

SEMINAR NASIONAL, BEDAH BUKU & PAMERAN

Pendidikan Ekologi dan Etika Kemanusiaan: Suatu Keniscayaan bagi Perubahan Budaya Tata Kelola Kawasan

Teater Barat, Kampus Pakuwon City, Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya
Jl. Raya Kalisari Selatan no. 1, Surabaya

Rabu, 19 Agustus 2026

08.30–16.30 WIB

Sambutan



Prof. Dr. Ir. Daniel Murdiyoso, MS
Ketua AIPI



Prof. M. Amin Abdullah
Ketua Komisi Kebudayaan AIPI

Sesi 1 : Seminar

Etika Kemanusiaan dalam Tatakelola Kawasan



Prof. Damayanti Buchori, Ph.D.
Anggota AIPI/IPB



Prof. Dr. F. Magnis Suseno, SJ.
Anggota AIPI



Airlangga Priyadi Kusman, Ph.D.
Universitas Airlangga

Moderator: Kristoforus Sri Ratulayn K.N., MPhil
Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya

Sesi 2 : Bedah Buku

Pendidikan Warga sebagai Ko-Kreator Demokrasi



Dr. Anastasia Jessica, MPhil.
Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya



Bahruddin
Qaryah Thayyibah



Dr. Ferry Sutrisna Wijaya
Eco Camp

Sesi Paralel



Paralel 1:
Paradigma
Pendidikan Ekologi



Paralel 2:
Etika Kemanusiaan dan
Keadilan Ekologis



Paralel 3:
Ekolinguistik dan
Diskursus Lingkungan



Paralel 4:
Studi Kasus dan
Praktik Baik



Pameran Praktik Baik Pendidikan Ekologi Komunitas

Qaryah Thayyibah | Pondok Pesantren Pabelan |
Sekolah Santa Maria Sidoarjo | Eco Camp | Centrum Laudato Si



LIVE di YouTube:
UKWMS Official



Narahubung:
Vianca (081256735224)
Ningsih Handayani (081510129921)

Registrasi



go.ukwms.ac.id/SeminarEkologi

Mohon membawa botol minum. Panitia menyediakan air isi ulang.



Catatan Bedah Buku
Ferry SW, 19 Ags 2026

Seminar Nasional III Tema 4

“Pendidikan Ekologi dan Etika Kemanusiaan:
Suatu Keniscayaan bagi Perubahan Budaya Tata Kelola Kawasan”

Rabu, 19 Agustus 2026, Pukul 09.00 -16.00 WIB

Teater Barat, Kampus Pakuwon City, Universitas Katolik Widya Mandala
Surabaya, Jl. Raya Kalisari Selatan no. 1, Surabaya

Komisi Kebudayaan Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)

Universitas Katolik Widya Mandala (Surabaya)



Seminar Nasional KK AIPI 19 Agustus 2026 di Surabaya



- KK AIPI tanggal 19 Agustus 2026 mengadakan seminar di Universitas Katolik Widya Mandala di Surabaya dengan tema “*Pendidikan Ekologi dan Etika Kemanusiaan: Suatu Keniscayaan bagi Perubahan Budaya Tata Kelola Kawasan*”.
- **Dasar pemikiran:** sedang terjadinya bencana antroposen yang merupakan manifestasi krisis ekologis sekaligus krisis etik, sedangkan praktik tata kelola kawasan seringkali tidak berbasis pada literasi ekologis dan tanggung jawab kemanusiaan, padahal pendidikan memiliki fungsi transformatif dalam membangun budaya baru yang lebih adaptif, berbasis etika untuk mengelola lingkungan, dan berkeadilan sosial, sehingga diperlukan strategi edukatif lintas sektor untuk membentuk komitmen kolektif dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Seminar Nasional KK AIPI 19 Agustus 2026 di Surabaya



- **Tujuan umum:** untuk menghasilkan kerangka konseptual dan strategis mengenai integrasi pendidikan ekologi dan etika kemanusiaan dalam perubahan budaya tata kelola kawasan.
- **Tujuan khusus:** mengidentifikasi praktik-praktik baik (*best practices*) pendidikan ekologi dan etika publik, merumuskan model edukasi berbasis sains dan nilai kemanusiaan, menghasilkan rekomendasi kebijakan pendidikan yang mendukung tata kelola kawasan berkelanjutan, dan mendorong kolaborasi multipihak dalam implementasi pendidikan ekologis.

Seminar Nasional KK AIPI 19 Agustus 2026 di Surabaya



- **Luaran substantif:** berupa rekomendasi konseptual tentang pendidikan ekologi dan etika kemanusiaan, rumusan strategi integratif dalam tata kelola kawasan, dan kontribusi naskah untuk buku AIPI berjudul “*Quo Vadis Bencana Antroposen: Cegah Kehancuran Bumi Nusantara*”.
- **Luaran strategis:** berupa peta jalan (roadmap) edukasi ekologis berbasis nilai kemanusiaan dan penguatan jejaring kolaborasi multipihak.

Pendidikan Warga Sebagai Ko-Kreator Demokrasi

1. **Kompetensi** apa sajakah dalam kaitannya dengan etika dan nilai demokrasi yang telah disasar melalui kebijakan dan praktik pendidikan dalam sektor formal serta melalui gerakan/praktik pendidikan publik berbasis komunitas yang dilakukan oleh organisasi/kelompok ?
2. Cara bagaimana ekosistem pendidikan formal dan ekosistem pendidikan publik dibangun/disusun untuk dapat **meningkatkan kompetensi** warga untuk membangun budaya demokrasi ?
3. Bagaimana kebijakan dan gerakan pendidikan formal dan gerakan/ pendidikan publik dapat menjawab tantangan dan masalah demokrasi di Indonesia ke depan ?



Pendidikan Warga Sebagai Ko-Kreator Demokrasi

Peserta Didik sebagai Ko-Kreator dalam Mendesain Kembali Demokrasi: Warga Negara Kompeten dan Pelibatan Kerja Publik (Haryatmoko)

- **Kompetensi Warga:** mampu berpikir kritis, memiliki empati, dapat merumuskan kepentingan publik secara jelas, serta berdaya tawar dalam memengaruhi dan mengoreksi kebijakan pemerintah.
- **Cara Meningkatkan Kompetensi Warga:** gunakan lima model pembelajaran kritis yang penting dipelajari agar menjadi warga negara yang kompeten yaitu logika abduksi, pemecahan masalah, berpikir komputasional, *design thinking*, dan analisis wacana kritis. Pendidikan publik harus bersifat partisipatif, menumbuhkan kepercayaan diri warga dalam menyuarakan gagasan dan melatih mereka untuk berpikir kritis, reflektif, serta peduli pada kesejahteraan bersama.



Pendidikan Warga Sebagai Ko-Kreator Demokrasi

Pendidikan untuk Membangun Kecakapan Berdemokrasi (Anindito Aditomo)

- Kompetensi Warga: mampu terlibat dalam deliberasi publik, yaitu proses musyawarah untuk merumuskan masalah dan mencari solusi bersama atas isu kebijakan yang kompleks.
- Cara Meningkatkan Kompetensi Warga: dengan Program Merdeka Belajar yang dirancang guna membangun kecakapan deliberasi dengan mengajarkan kompetensi esensial yaitu kemampuan mengintegrasikan literasi, numerasi, pemikiran kritis, empati, kolaborasi, serta nilai-nilai Profil Pelajar Pancasila.



Pendidikan Warga Sebagai Ko-Kreator Demokrasi

Model Pembelajaran melalui Metode Analisis Wacana Kritis di Kalangan Sivitas Akademika sebagai Ko-Kreator Demokrasi (Sidharta)

- Kompetensi Warga (Sivitas Akademika): mampu mempertanyakan secara sistematis teks-teks politik, hukum, maupun sosial, sehingga tidak hanya memahami struktur makro dan mikro wacana, tetapi juga implikasinya bagi kehidupan demokratis.
- Cara Meningkatkan Kompetensi Warga: melalui pembelajaran berbasis analisis wacana kritis sebagai instrument pendidikan public untuk memperkuat fondasi demokrasi substansial melalui peran aktif kelas menengah terdidik (sivitas akademika) sebagai ko-kreator demokrasi.



Pendidikan Warga Sebagai Ko-Kreator Demokrasi

Tantangan dan Harapan Pendidikan Warga dalam Putaran Permasalahan Demokrasi di Indonesia (Anita Lie)

- Kompetensi Warga: mampu menumbuhkan tradisi kontrol sosial yang berkelanjutan melalui pengembangan kapasitas kritis, etika, dan karakter.
- Cara Meningkatkan Kompetensi Warga: melalui model pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu Tiga-Kon (kosentrisitas, konvergensi, kontinuitas) dan Tiga-Pusat (keluarga, sekolah, masyarakat) sebagai kerangka penting untuk membangun warga yang inklusif, kritis, dan berdaya.



Pendidikan Warga Sebagai Ko-Kreator Demokrasi

Seni, Pendidikan, dan Demokrasi: Sebuah Tawaran Alternatif (Zita Wahyu Larasati).

- Kompetensi Warga: mampu menanggapi isu-isu sosial secara reflektif dan kritis.
- Cara Meningkatkan Kompetensi Warga: melalui pendidikan dialogis yang kontekstual, di mana seni berfungsi bukan hanya sebagai tujuan pembelajaran, melainkan sebagai media untuk mengekspresikan realitas sosial, sehingga karya seni siswa menjadi bagian dari diskusi demokrasi sehari-hari yang memungkinkan mereka menanggapi isu-isu sosial secara reflektif dan kritis. Integrasi seni dalam pendidikan dipandang sebagai pendekatan transformatif yang menumbuhkan empati, daya kritis, serta kesadaran sosial.



Pendidikan Warga Sebagai Ko-Kreator Demokrasi

Sekolah Perempuan Mosintuwu: Transformasi Korban, Penyintas, dan Agen Pembaharuan Desa (Lian Gogali)

- Kompetensi Warga: mempunyai empati, keluar dari zona nyaman kelompok untuk memahami nilai dan perspektif kelompok yang berbeda sehingga berhasil membangun
- Cara Meningkatkan Kompetensi Warga: kerja sama lintas kelompok demi kesejahteraan bersama, proses memahami isu dengan segala kompleksitasnya, serta mampu mengorganisasikan diri untuk mencapai tujuan bersama.



Pendidikan Warga Sebagai Ko-Kreator Demokrasi

Rekacipta Budaya Anti Kekerasan terhadap Anak dan Perempuan: Pengalaman YABIKU (Maria Filiana Tahu)

- Kompetensi warga negara yang kompeten: menjadi sosok proaktif yang mampu menuntut hak keadilan dan perlindungan terhadap perempuan.
- Cara Meningkatkan Kompetensi Warga: prosesnya diawali dari pemberdayaan ekonomi secara kolektif yang memberikan kemandirian, memberikan wawasan tentang gender dan pentingnya pemberdayaan perempuan sehingga muncul kesadaran kritis dan akan semakin kokoh ketika tercipta sistem paralegal komunitas.



Pendidikan Warga Sebagai Ko-Kreator Demokrasi



Praksis Pendidikan Anak di Sanggar Anak Akar (Ibe Karyanto)

- Kompetensi Warga: mampu belajar berorganisasi, menyepakati aturan dan mengatur hidup bersama serta mengasah kepemimpinan, mampu menganalisis masalah, belajar dari kesalahan, dan merencanakan agenda ke depan.
- Cara Meningkatkan Kompetensi Warga: lewat mengorganisasi diri secara kolektif lewat Dewan Koordinator Anak (Dekan) dan melalui musyawarah belajar mengambil keputusan untuk memecahkan masalah yang mereka hadapi sehari-hari.



Pendidikan Warga Sebagai Ko-Kreator Demokrasi

Membangun Benih Demokrasi melalui Pendekatan BOLA (Servaniandei Satyaprawira Benyamin Lumy)

- Kompetensi Warga: mandiri dengan bekal berbagai keterampilan, mempunyai citra diri yang positif, yang penuh disiplin, keterampilan psikososial untuk menyiasati situasi rawan kekerasan, kesempatan berprestasi untuk mengaktualisasi diri, serta kesadaran akan hak perlindungan anak.
- Cara Meningkatkan Kompetensi Warga: lewat praktik partisipatif pendekatan BOLA (Bermain Olahraga Lindungi Anak) yang dirancang untuk perubahan sosial dan pencegahan perilaku beresiko.



Pendidikan Warga Sebagai Ko-Kreator Demokrasi

Logika Abduksi dalam Proses Belajar Agrometeorologi: Menjadi Petani Peneliti, Mampu Mengantisipasi dan Merancang Strategi
(Yunita T. Winarto dan Nandang Heryana)

- Kompetensi Warga: siap belajar seumur hidup dan menguasai metode belajar dari kompleksitas yang dihadapi, kemampuan antisipatif, yang ditopang oleh pemikiran kritis dan kreatif.
- Cara Meningkatkan Kompetensi Warga: dengan mempelajari proses yang disebut “logika abduksi” yaitu suatu metode belajar yang membongkar kompleksitas, serta memanfaatkan kemampuan interpretasi dan perluasan imajinasi untuk mengambil keputusan.



Pendidikan Warga Sebagai Ko-Kreator Demokrasi

Maca Kahanan: Program Literasi untuk Peningkatan Kapasitas Warga
(Widie Nurmahmudy)

- Kompetensi Warga: mempunyai semangat kerja yang dilanjutkan dari satu generasi lainnya, memerlukan penanaman visi yang kuat dan memiliki jejaring pendukung dari satu mitra ke mitra lainnya.
- Cara Meningkatkan Kompetensi Warga: melalui program Mata Kahanan yang partisipatif dan kontekstual yakni warga mengajar sesama marga, dan lalu memberdayakan ekosistem dengan berkelanjutan, serta memerlukan penanaman visi yang kuat.

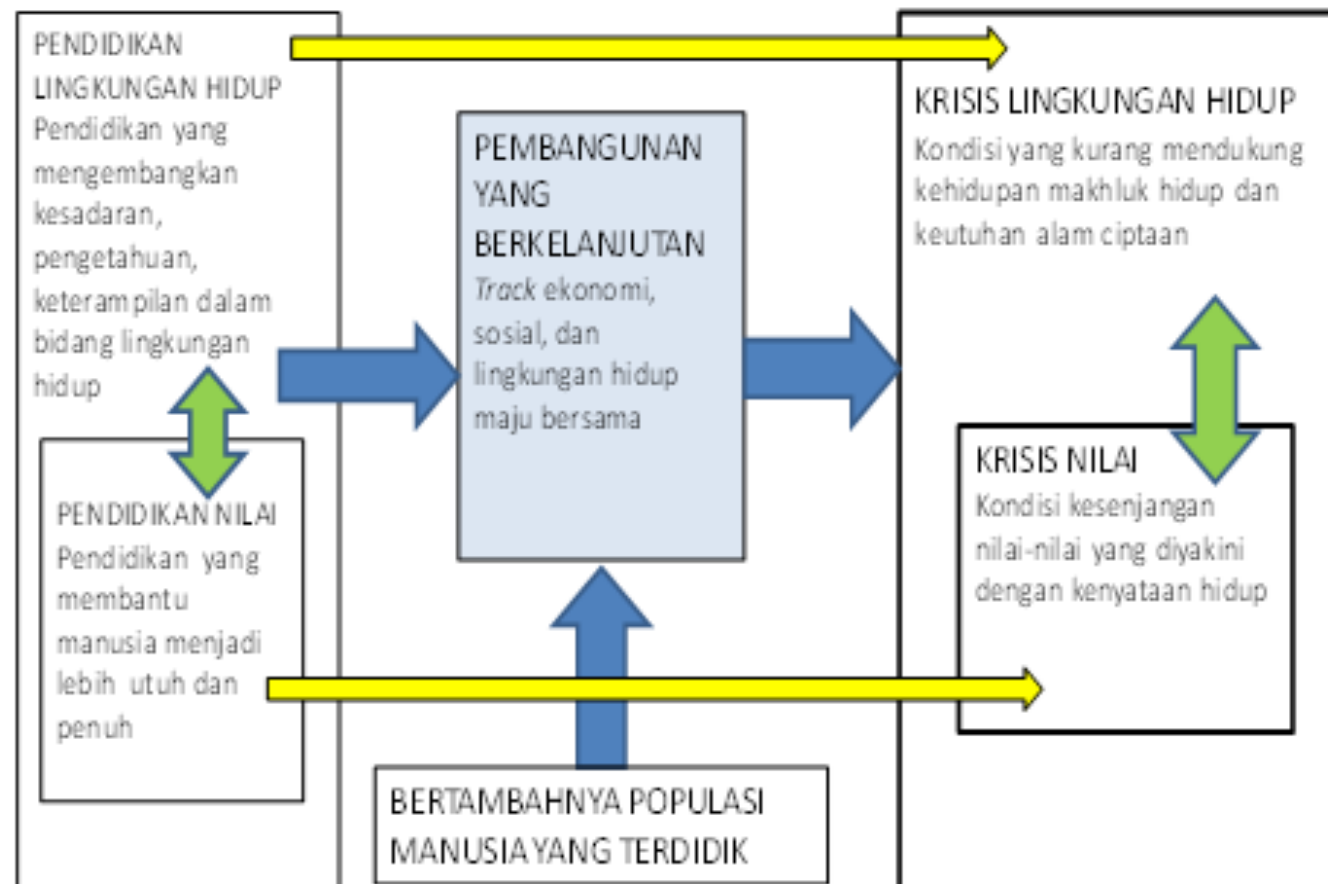


Seminar Nasional KK AIPI 19 Agustus 2026 di Surabaya



- Dalam undangan kepada Ferry SW sebagai pembedah buku, Ferry SW diharapkan untuk membahas secara kritis isu-isu penting dalam buku tersebut, terutama mengaitkannya dengan praktik di komunitas Eco Camp di Bandung.

Hubungan Pendidikan Lingkungan Hidup dengan Pendidikan Nilai



PENGEMBANGAN MODEL KONSEPTUAL
RUMAH BELAJAR LINGKUNGAN HIDUP
(ECO LEARNING CAMP)
SEBAGAI MODEL PENDIDIKAN NILAI

DISERTASI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian dari
Syarat Memperoleh Gelar Doktor Pendidikan
Program Studi Pendidikan Umum



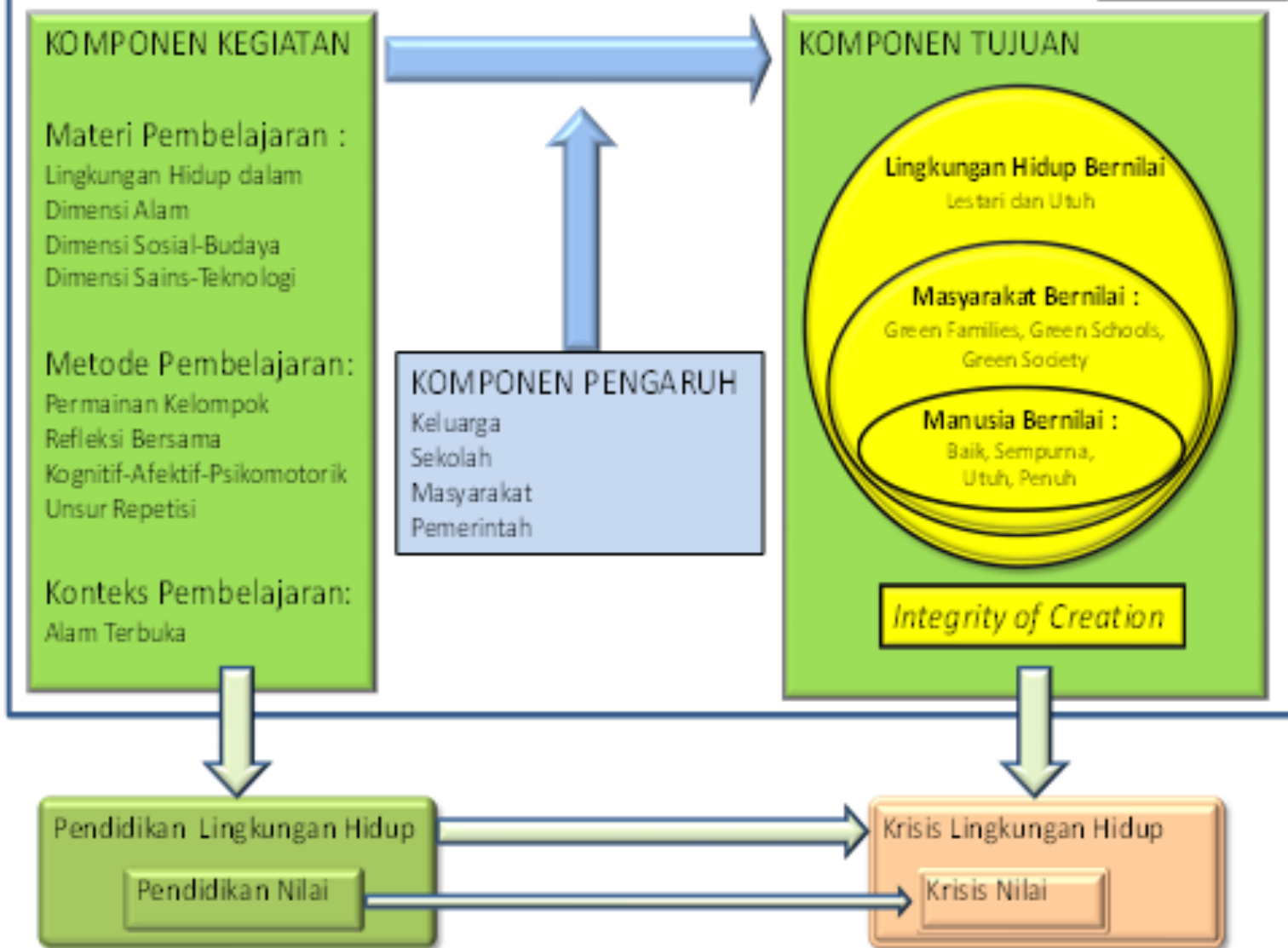
Oleh

SUTRISNA WIDJAJA
0706341

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN UMUM
SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
BANDUNG
2012

Model Konseptual Rumah Belajar Lingkungan Hidup (*Eco Learning Camp*)

Sutrisna Widjaja
UPI 0706341
29 Agustus 2012



PENGEMBANGAN MODEL KONSEPTUAL
RUMAH BELAJAR LINGKUNGAN HIDUP
(*ECO LEARNING CAMP*)
SEBAGAI MODEL PENDIDIKAN NILAI

DISERTASI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian dari
Syarat Memperoleh Gelar Doktor Pendidikan
Program Studi Pendidikan Umum

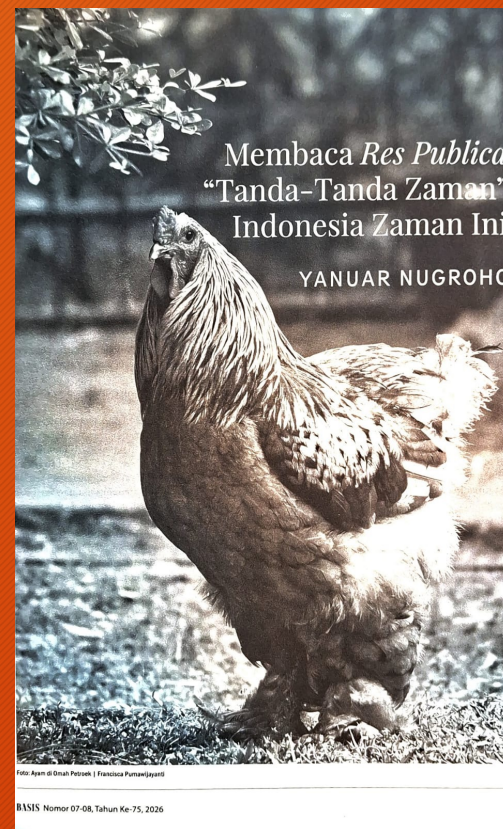


Oleh

SUTRISNA WIDJAJA
0706341

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN UMUM
SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
BANDUNG
2012

Membaca Tanda Zaman Indonesia



Pengantar Yanuar Nugroho

- *The Economist* (16 Maret 2026) menulis artikel yang mengejutkan meski telah lama dirasakan yaitu bahwa Presiden RI tengah “*jeopardising the economy and democracy*” (merusak ekonomi dan demokrasi). Kata-kata ini menohok karena tidak datang dari opini domestik yang gampang dicap politis tapi dari media bereputasi global. Tanggapan Presiden Prabowo Subianto dimuat oleh *The Economist* (10 Juni 2026).
- *Situasi Ekonomi Memburuk*: *Moody's and Fitch* merevisi *outlook* peringkat kredit Indonesia menjadi negatif. Kurs Rupiah terhadap USD tembus Rp.17.000. Kondisi fiskal memperlihatkan sempitnya ruang gerak pemerintah.
- *Situasi Politik Memburuk*: Andrie Yunus, Wakil Koordinator Kontras, disiram air keras tanggal 12 Maret 2026. WALHI mencatat setidaknya 50 korban dari 10 kasus kekerasan sepanjang 2025-2026. Film *Pesta Babi* *dibubarkan paksa di beberapa tempat*. Intimidasi digunakan untuk membungkam suara kritis.
- *Esai Yanuar Nugroho* adalah undangan untuk membaca situasi Indonesia saat ini dengan jernih, dengan kepala dingin tapi hati berkobar karena yang dipertaruhkan adalah masa depan hidup bersama kita. Tanda-tanda zaman (*signa temporum*) dibaca dengan *horizon scanning* untuk melihat lebih jauh apa yang sesungguhnya terjadi, ke mana arah gerakannya, dan apa yang mesti dilakukan.

1. Dimensi Sosial

- Ketimpangan sosial tidak membaik dan orang miskin hidup semakin berat.
- Kelas menengah terimpit dua arah: tertekan biaya hidup yang semakin meningkat, namun terlalu kaya untuk mendapat perlindungan sosial. Jutaan keluarga hidup di zona abu-abu: tak miskin menurut data, tapi tak aman dalam kenyataan hidup sehari-hari termasuk di meja makan.
- Fragmentasi komunal meningkat ditandai dengan intoleransi dan kekerasan terhadap kelompok minoritas baik agama maupun identitas.
- Orang muda aktif berpolitik melalui protes jalanan, petisi digital, dan satire media sosial karena semakin tak percaya pada lembaga yang ada.
- Terjadi erosi kepercayaan sebagai perekat demokrasi.

2. Dimensi Ekonomi

- Pertumbuhan ekonomi tanpa keadilan. Pemerintah merayakan dengan bangga, tapi rakyat hidup semakin berat dan susah.
- Sektor informal di mana 60% angkatan kerja tergantung masih tertatih-tatih.
- Lesunya daya beli dan lambatnya pemulihan ekonomi ditandai turunnya realisasi penerimaan pajak.
- Arsitektur ekonomi semakin sentralistik yang minim transparansi dan berpotensi pemusatan kendali sumber daya negara.

3. Dimensi Ekologi

- Pemerintah membangun di atas bencana dan kerentanan karena model pembangunan yang mengabaikan daya dukung lingkungan.
- Pembangunan kawasan hulu dikorbankan untuk usaha dan izin ekstraktif yang diberikan tanpa menghitung daya dukung ekologis sehingga dengan demikian pemerintah sedang menanam bencana dengan kebijakan.
- Kapasitas manajemen bencana yang lebih berorientasi para respons ketimbang pencegahan (lihat kasus banjir di Sumatera).
- Rencana *food estate* di Papua, Kalimantan, Sumatera, dan lain-lain yang tidak belajar dari kegagalan serupa di era sebelumnya.

4. Dimensi Teknologi

- Kenaikan empat kali lipat insiden AI berbahaya sepanjang 2025 dibandingkan dua tahun sebelumnya.
- Penggunaan teknologi pengintaian untuk melacak aktivis dan jurnalis.
- Dampak algoritmik pada pekerja *gig economy* yang membuat jam kerja mereka lebih panjang dengan upah yang lebih rendah.
- Indeks Keamanan Siber Indonesia yang terus menurun dari peringkat 48 ke 84 pada tahun 2023.
- Serangan *ransomware* pada Pusat Data Nasional melumpuhkan 44 lembaga dan sekitar 300 kantor pemerintah pada Juni 2024.
- Teknologi bukan untuk mencerdaskan publik, melainkan untuk mengekang dan mengancam publik.

5. Dimensi Politik

- Demokrasi yang hanya prosedural dan otoriterianisme dan militerisme yang semakin substantif.
- Indonesia masuk kategori *flawed democracy* dengan semakin menurunnya demokrasi dalam beberapa tahun terakhir.
- Parlemen terperangkap dalam koalisi nyaris sempurna mendukung pemerintah secara bulat.
- Lebih dari 659 calon kepala daerah pada Pilkada 2025 berasal dari dinasti politik dan 14-23% anggota DPR 2024 punya ikatan keluarga dengan elite.
- Oligarki bukan lagi sembunyi-sembunyi melainkan bertindak tanpa malu dengan terang benderang.
- Kritik terhadap kebijakan dijawab dengan represi, intimidasi, dan stigma.
- Kebijakan dieksekusi dengan logika preman dan bukan logika hukum atau argumen.

6. Dimensi Nilai

- Terjadi erosi keadaban publik dan erosi nilai-nilai yang menopang kehidupan bersama.
- Korupsi menjadi normalisasi ketidakjujuran ketika pejabat korup malahan dipromosikan.
- Integritas tidak menguntungkan dan bisa kena sanksi hukum.
- Kebohongan publik pejabat terjadi berulang kali dan malah dirayakan.
- Runtuhnya *epistemic trust* yaitu kepercayaan terhadap kebenaran fakta saat data kemiskinan diragukan akurasi, statistik keberhasilan program pemerintah tidak bisa diverifikasi, dan audit independen ditolak sehingga warga hidup dalam kegelapan informasi yang disengaja.
- Ruang publik bukan lagi arena argumen melainkan arena narasi kekuasaan sehingga yang hilang bukan hanya kebenaran melainkan juga kapasitas kolektif untuk bernalar bersama sebagai bangsa.

Apa yang menggerakkan semua ini?

- Pertama, matinya teknokratisme yaitu kebijakan berbasis data, pengelolaan fiskal yang hati-hati, dan lembaga independen sebagai penyeimbang. Program besar seperti MBG, KDMP, Sekolah Rakyat, dan lain-lain diluncurkan tanpa kajian mendalam dan tanpa evaluasi terbuka.
- Kedua, hegemoni tanpa konsensus yaitu normalisasi ketaatan yang lebih berbahaya daripada represi terang-terangan.
- Ketiga, ekonomi politik rente yang terkonsolidasi di mana di balik setiap program besar ada struktur insentif dan anggaran publik menjadi distribusi rente.

Apa yang perlu dilakukan masyarakat sipil?

- Pertama, memulihkan dan memperluas ruang deliberasi sipil dengan memperluas kualitas percakapan publik dan membangun jejaring lintas sektor dan memperkuat kanal dialog yang lebih terbuka dan inklusif.
- Kedua, membangun dan mempertahankan fungsi pengawasan antara lain dengan audit sosial untuk mengidentifikasi dan mengoreksi kesalahan.
- Ketiga, memperkuat solidaritas lintas sektor dan generasi.
- Keempat, mendorong dan memperkuat peran akademisi sebagai intelektual organik yang mampu mengartikulasikan kepentingan publik dalam bahasa yang bisa dipahami publik untuk membangun kesadaran kritis warga.

Penutup Yanuar Nugroho

- Tanda-tanda zaman memang menggelisahkan. Tapi bila kegelisahan tersebut disambut dengan kejujuran dalam pikiran dan tindakan dan bukan dengan diam, maka itu menjadi awal perubahan.
- Sejarah mengajarkan bahwa tak ada situasi dan kondisi yang permanen. Sistem yang kelihatan kuat pun bisa runtuh saat ia tak punya lagi legitimasi. Yang menentukan bukan sekuat apa rezim yang saat ini ada, melainkan seberapa ulet dan luas gerakan yang menandinginya.
- Maka sesuai tema Majalah *Basis* untuk bergembira, maka bergembira tak selalu berarti merayakan keadaan. Bergembira juga berarti merayakan kemungkinan bahwa perubahan itu mungkin dan nyata dan bahwa perjuangan itu menjadi tindakan bermakna dan bahwa kita masih bisa membangun masa depan yang lebih baik dari hari ini.
- Jika tidak sekarang, kapan lagi ? Jika tidak kita, siapa lagi ?

Analisis Yanuar Nugroho Atas Pidato Kenegaraan 2026

1. Pertama, negara direduksi menjadi pemerintah, pemerintah direduksi menjadi eksekutif, dan eksekutif akhirnya direduksi menjadi Presiden.
2. Kedua, ukuran keberhasilan yang dipakai terutama *output*, bukan *outcome*, apalagi kualitas institusi.
3. Ketiga, kecenderungan sangat kuat menyamakan *interventionism* dengan *state capacity*. TNI membangun jembatan, TNI mencari air, polisi membangun jembatan, aparat keamanan masuk program pangan dan berbagai program sipil.
4. Keempat, pidato ini hampir sepenuhnya menghapus demokrasi substantif dari gambaran keadaan bangsa.
5. Kelima, ekonomi yang dinyatakan adalah ekonomi agregat dan korporatis, sementara pengalaman ekonomi rumah tangga nyaris tak muncul.

Analisis Yanuar Nugroho Atas Pidato Kenegaraan 2026

6. Keenam, hampir tidak ada *fiscal honesty*. Ini kekurangan utama pidato ini. Pidato menyatakan seolah negara mempunyai ruang fiskal luas untuk melakukan hampir semuanya sekaligus.
7. Ketujuh, glorifikasi keputusan cepat yang implisit merendahkan deliberasi. Kalimat, “Saya tidak menerima mandat untuk menjelaskan, mengapa masalah tidak dapat diselesaikan” terdengar powerful.
8. Kedelapan, paling serius adalah pidato bicara keras tentang korupsi, tetapi tidak bicara tentang konflik kepentingan dan pembatasan kekuasaan.
9. Kesembilan, konsepsi pembangunan manusia yang masih sangat instrumental. Bagian pendidikan akhirnya bergerak dari gizi, sekolah, layar pintar, bahasa asing, ke kemampuan anak Indonesia menjadi tenaga kerja di Jepang, Korea dan Eropa serta mengirim devisa.

Analisis Yanuar Nugroho Atas Pidato Kenegaraan 2026

- Di pidato ini rakyat terutama hadir sebagai '*beneficiary*': diberi makan, rumah, sekolah, jembatan, bantuan sosial, koperasi, kesehatan.
- Hampir tidak pernah muncul sebagai *citizen*: warga yang memiliki hak mengawasi kekuasaan, berbeda pendapat, berorganisasi, menggugat pemerintah, ikut menentukan prioritas dan menuntut pertanggungjawaban.
- Kritik paling mendasar: pidato ini menawarkan negara yang semakin hadir, tetapi belum tentu republik yang semakin kuat. Negara hadir melalui program, uang, BUMN, teknologi, Presiden, TNI, polisi dan intervensi.

Pendidikan Warga Sebagai Ko-Kreator Demokrasi



Ferry SW

1. Buku ini telah berhasil menampilkan 11 contoh model bagaimana pendidikan formal dan pendidikan informal berbasis komunitas telah merumuskan dan mewujudkan berbagai kompetensi warga serta berbagai cara bagaimana meningkatkan kompetensi warga untuk semakin menjadikan warga sebagai ko-kreator demokrasi.
2. Dengan itu 11 contoh model dalam buku tersebut sudah berhasil menjawab pertanyaan bagaimana kebijakan dan gerakan pendidikan formal dan gerakan/pendidikan publik dapat menjawab tantangan dan masalah demokrasi di Indonesia ke depan.



Pendidikan Warga Sebagai Ko-Kreator Demokrasi



Ferry SW

3. Namun saat ini di Indonesia semakin terjadi fenomena demokrasi yang cacat (*flawed democracy*) akibat pengeroposan demokrasi (*backsliding democracy*) akibat gaya kepemimpinan dan pemerintahan yang semakin otoriter dan militeristik.
4. Rakyat di Indonesia semakin dipandang sebagai *beneficiary* dan bukan *citizen*. Negara sebagai pemerintah semakin hadir, namun republik sebagai rakyat tidak semakin mengalami demokrasi. Kritik direpresi dengan ancaman dan kekerasan.



Pendidikan Warga Sebagai Ko-Kreator Demokrasi



Ferry SW

5. Saat deforestasi global semakin menurun, Indonesia justru lewat berbagai proyek PSN mengancam bukan hanya kehilangan hutan, melainkan juga mengancam kehidupan masyarakat adat yang hidupnya tergantung keberadaan hutan.
6. Pidato kenegaraan 2026 tidak sepatah kata pun menyebutkan *El Nino* dan menyampaikan rencana pemerintah untuk memitigasinya, padahal *climate change* sudah menjadi *climate crisis* dan *climate emergency* serta *global warming* sudah menjadi *global boiling*. Batas kenaikan 1,5 C di atas suhu rata-rata global dibandingkan awal zaman industrialisasi sudah terlampaui.



Pendidikan Warga Sebagai Ko-Kreator Demokrasi



Ferry SW

7. Untuk meningkatkan kemampuan warga sebagai ko-creator demokrasi dibutuhkan dukungan komponen pengaruh keluarga, sekolah, masyarakat, dan pemerintah.
8. Oleh karena itu, dukungan para pemimpin maupun warga lainnya sebagai *role leader* sangat penting.
9. Prof. Wendy Wood dalam buku *Good Habits and Bad Habits* (2019) mengatakan bahwa perubahan hidup tidak mungkin hanya bergantung pada niat dan pengetahuan, melainkan melalui pengaturan lingkungan (konteks), pengulangan kebiasaan baik yang konsisten (repetisi), dan sistem imbalan (*reward*).



Pendidikan Warga Sebagai Ko-Kreator Demokrasi



Ferry SW

10. Langkah selanjutnya adalah melengkapi buku dengan pendidikan ekologi.
11. Model “*Reconnect, Learn, and Grow with Nature*” yang ditawarkan oleh Eco Camp di Bandung dapat menjadi salah satu model pelengkap yang mengintegrasikan pendidikan demokrasi dan etika kemanusiaan dengan pendidikan ekologi yang berbasis sains dan kemanusiaan dalam konteks Indonesia yang sedang semakin tidak baik-baik saja.

Terima kasih.

